

M . 20 / 2021



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
REFORMASI BIROKRASI (RB)
PADA KECAMATAN SANGKAPURA
KABUPATEN GRESIK**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK
Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 308
GRESIK

**LAPORAN HASIL PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI
PADA KECAMATAN SANGKAPURA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020**

Nomor : 700/1247/437.72/2021
Tanggal : 27 Agustus 2021
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Satuan Kerja : Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dapat diuraikan sebagaimana Lembar kerja evaluasi Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sebagai berikut :

NO	PENILAIAN	BOBOT	NILAI	%
PENGUNGKIT		36,30	28,48	78,45
I. Pemenuhan		14,60	10,31	70,61
1.	Manajemen Perubahan	2,00	0,83	41,15
i	Tim Reformasi Birokrasi	0,40	0,27	67,50
ii	Road Map Reformasi Birokrasi	0,40	0,13	32,50
iii	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	0,80	0,23	28,75
iv	Perubahan Pola Pikir dan Budaya	0,40	0,20	50,00
2.	Deregulasi Kebijakan	1,00	0,50	50,00
	Harmonisasi	1,00	0,50	50,00
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,12	56,00
i	Penataan Organisasi	1,00	0,95	95,00
ii	Tindaklanjut Evaluasi	1,00	0,17	15,30
4.	Penataan Tatalaksana	1,00	0,95	95,00
i	Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP)	0,50	0,45	90,00
ii	Keterbukaan Informasi Publik	0,50	0,50	100
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,16	82,85
i	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	0,20	0,20	100
ii	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	0,20	0,03	15,00
iii	Penetapan Kinerja Individu	0,40	0,40	100
iv	Penegakan Aturan Disiplin/kode etik/kode perilaku	0,20	0,20	100

	pegawai			
v	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0,20	0,13	65,00
vi	Sistem Informasi Kepegawaian	0,20	0,20	100
6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	1,95	78,00
i	Keterlibatan pimpinan	1,00	0,89	89,00
ii	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1,50	1,07	71,33
7.	Penguatan Pengawasan	2,20	1,97	89,54
i	Gratifikasi	0,30	0,26	86,66
ii	Penerapan SPIP	0,30	0,20	66,66
iii	Pengaduan Masyarakat	0,50	0,45	90,00
iv	Whistle Blowing System	0,30	0,30	100
v	Penanganan Benturan Kepentingan	0,30	0,26	86,66
vi	Pembangunan Zona Integritas	0,50	0,50	100
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	1,83	75,20
i	Standar Pelayanan	0,40	0,27	67,50
ii	Budaya Pelayanan Prima	0,40	0,27	67,50
iii	Pengelolaan Pengaduan	0,60	0,55	91,66
iv	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	0,70	0,41	58,57
v	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,40	0,33	82,50
II.	REFORM	21,70	18,79	86,59
1.	Manajemen Perubahan	3,00	2,59	86,33
i	Komitmen dalam Perubahan	1,50	1,50	100
ii	Komitmen Pimpinan	1,00	0,75	75,00
iii	Membangun Budaya Kerja	0,50	0,34	68,00
2.	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	100
i	Peran Kebijakan	2,00	2,00	100
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	0,75	50,00
i	Organisasi Berbasis Kinerja	1,50	0,75	50,00
4.	Penataan Tata Laksana	3,75	2,59	69,06
i	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan	0,50	0,34	68,00
ii	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi	1,25	1,25	100
iii	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2,00	1,00	50,00
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,25	62,50
i	Kinerja Individu	1,00	1,00	100
ii	Assessment Pegawai	0,50	0,25	50,00
iii	Pelanggaran Disiplin Pegawai	0,50	0,00	0,00
6.	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,72	99,20
i	Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	1,00	0,97	97,00
ii	Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas	1,00	1,00	100

iii	Pemberian Reward and Punishment	1,00	1,00	100
iv	Kerangka Logis Kinerja	0,75	0,75	100
7.	Penguatan Pengawasan	1,95	1.95	100
i	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	0,75	0,75	100
ii	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	0,60	0,60	100
iii	Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,60	0,60	100
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,34	89,06
i	Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2,50	2,5	100
ii	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	1,25	0,84	67,20
TOTAL PENGUNGKIT		36,30	28,48	78,45

I. Manajemen Perubahan

1. Tim Reformasi Birokrasi

Kecamatan Sangkapura telah menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dengan Keputusan Kecamatan Sangkapura untuk menentukan dan menetapkan susunan keanggotaan tim. Rencana Kerja telah dilaksanakan oleh tim namun sebagian kecil yang dilakukan monitoring, dengan hasil evaluasi yang telah ditindaklanjuti.

2. Road Map Reformasi Birokrasi

Kecamatan Sangkapura telah menyusun Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi, namun belum ada anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan internalisasi rencana kerja Reformasi Birokrasi dimana Rencana Kerja belum menyajikan prioritas perbaikan, target, waktu dan penanggungjawab.

3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Sangkapura dilakukan oleh Asesor pejabat struktural lapis kedua, namun rencana aksi dan tindak lanjut belum dikomunikasikan, sehingga hanya sebagian kecil rencana kerja yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi. Hasil evaluasi telah ditindalanjuti.

4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja

Pimpinan pada Kecamatan Sangkapura selama ini belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian besar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan telah berupaya membentuk agent of change melalui Keputusan Kecamatan Sangkapura Nomor 067.2/..../437.117/2020 Tentang Penunjukan Agen Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, agar memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja.

II. Deregulasi Kebijakan

Kecamatan Sangkapura telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat, namun belum dilakukan revisi atas kebijakan tersebut.

III. Penataan dan Penguatan Organisasi

1. Evaluasi Kelembagaan

Dalam rangka Penataan dan Penguatan Organisasi pada Kecamatan Sangkapura telah dilakukan evaluasi ketepatan fungsi dan ukuran Organisasi, pengukuran jenjang organisasi, duplikasi fungsi, kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit kerja, kesesuaian struktur organisasi, sebagian dari struktur organisasi telah dilakukan evaluasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

2. Tindaklanjut Evaluasi

Kecamatan Sangkapura sebagai upaya penataan organisasi dalam penyederhanaan birokrasi, hanya sebagian kecil hasil evaluasi ditindaklanjuti.

IV. Penataan Tatalaksana

1. Proses bisnis dan Prosedur Operasional tetap (SOP)

Dalam rangka penataan tatalaksana Kecamatan Sangkapura telah menyusun Peta Proses Bisnis yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi yang dijabarkan dalam Prosedur Operasional Tetap (SOP). Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP, dan telah dievaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Kecamatan Sangkapura telah menyusun Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

V. Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

Dalam rangka Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Kecamatan Sangkapura telah melakukan perhitungan kebutuhan pegawai, analisis jabatan dan beban kerja yang selaras dengan kinerja utama.

2. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Dalam rangka Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Kecamatan Sangkapura telah melakukan Identifikasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi pada sebagian kecil pegawai yang sesuai dengan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi.

3. Penetapan Kinerja Individu

Kecamatan Sangkapura telah melakukan penetapan Kinerja Individu terhadap seluruh pegawai namun belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir.

4. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Kecamatan Sangkapura Praja telah diimplementasikan dan dilakukan secara berkala.

5. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

Standart kompetensi jabatan pada Kecamatan Sangkapura telah diimplementasikan sesuai dengan SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) pada sebagian jabatan sesuai dengan kebutuhan unit kerja.

6. Sistem Informasi Kepegawaian

Seluruh Pegawai Kecamatan Sangkapura dapat mengakses Informasi Kepegawaian

VI. Penguatan Akuntabilitas

1. Keterlibatan pimpinan

Pimpinan Kecamatan Sangkapura terlibat secara langsung dalam Penyusunan Renstra, Penetapan Kinerja, Perjanjian kinerja serta melakukan pemantauan pencapaiannya secara berkala, namun belum ada laporan pemantauan atas renaksi Setda.

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Kecamatan Sangkapura melakukan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dan dilakukan pemutakhiran data kinerja secara triwulanan.

VII. Penguatan Pengawasan

1. Gratifikasi

Kecamatan Sangkapura telah melakukan Public Campaign tidak dilakukan secara berkala, penanganan gratifikasi telah diimplementasikan, dievaluasi dan ditindaklanjuti.

2. Penerapan SPIP

Dalam rangka penerapan SPIP, Kecamatan Sangkapura telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian namun ada beberapa yang harus dipenuhi diantaranya :

- a. Penilaian resiko oleh unit kerja belum dilakukan;
- b. Hanya sebagian kecil dari program/kegiatan dari unit kerja telah dilakukan penilaian resiko;
- c. Sehingga hanya sebagian kecil resiko yang telah diidentifikasi dan diminimalisir melalui kegiatan pengendalian.

3. Pengaduan Masyarakat

Hasil pengaduan masyarakat pada Kecamatan Sangkapura sebagian besar telah ditindaklanjuti, dimonitoring dan dievaluasi.

4. Whistle-Blowing System

Kecamatan Sangkapura Telah mensosialisasikan Whistle-Blowing System ke sebagian kecil Pegawai.

5. Penanganan Benturan Kepentingan

Kecamatan Sangkapura telah melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan dan di evaluasi penanganan benturan kepentingan namun tidak dilakukan secara berkala.

6. Pembangunan Zona Integritas

Kecamatan Sangkapura telah melakukan penancangan pembangunan Zona Integritas.

VIII. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Standar Pelayanan

Kecamatan Sangkapura telah menetapkan Standart Pelayanan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan.

2. Budaya Pelayanan Prima

Kecamatan Sangkapura telah pelatihan/sosialisai pelayanan prima secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis pelayanan. Seluruh informasi pelayanan dapat di akses secara online namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional.

3. Pengelolaan Pengaduan

Dalam rangka mengelola pengaduan, Kecamatan Sangkapura mempunyai media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online ditangani oleh petugas dan sudah terintegrasi dengan SP4N LAPOR dan sebagian besar pengaduan telah ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan.

4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

Kecamatan Sangkapura melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam setahun, dan hasil survey hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kecamatan Sangkapura menggunakan Teknologi Informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan, dengan perbaikan yang dilakukan secara terus menerus.

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil penilaian berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

Demikian disampaikan hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, dengan harapan pada tahun – tahun mendatang menjadi lebih baik dan terarah.

Mengetahui:

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

EDY HADISISWOYO, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680503 199703 1 011

TIM EVALUATOR :

1. J. GANDJUR A, S.Sos., MM

2. NI PUTU TRISNA A, SH

3. MASDUKAN., SH, MM

4. TIFFANY ANGGRAENI, S.Psi

5. DAVID CAHYONO, SH

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
A. PENGUNGKIT		36,30				28,48	78,45
I. PEMENUHAN		14,60				10,31	70,61
1. MANAJEMEN PERUBAHAN		2,00			Ya	0,83	41,15
I. Tim Reformasi Birokrasi		0,40				0,27	67,50
	a.	Tim Reformasi Birokrasi/Penanggu jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk	a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggu jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggu jawab Reformasi Birokrasi unit kerja namun tanpa ditetapkan formal c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggu jawab Reformasi Birokrasi unit kerja	A/B/C	A	1,00	
	b.	Tim Reformasi Birokrasi/Penanggu jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja	a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggu jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggu jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggu jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja d. Belum ada tugas yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggu jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja	A/B/C/D	A	1,00	
	c.	Tim Reformasi Birokrasi/Penanggu jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	A/B/C/D	D	0,00	
II. Road Map Reformasi Birokrasi		0,40				0,13	32,50
	a.	Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan	Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan	Ya/Tidak	Ya	1,00	
	b.	Terlaksana sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi	a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi d. Belum ada anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	A/B/C/D	D	0,00	
	c.	Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan Road Map	a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan Road Map b. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan, namun belum selaras dengan Road Map c. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, dan penanggungjawab	A/B/C	C	0,00	
III. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi		0,80				0,23	28,75
	a.	Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Belum ada partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB	A/B/C/D	C	0,33	
	b.	Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB	a. Mayoritas koordinator asesor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator asesor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas c. Para asesor belum menetapkan nilai PMPRB dan/atau tidak ada kriteria yang dibahas	A/B/C	B	0,50	
	c.	Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan	a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	A/B/C	C	0,00	
	d.	Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja	a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	A/B/C/D	C	0,33	
IV. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja		0,40				0,20	50,00
	a.	Terdapat keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian besar pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian kecil pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A/B/C/D	D	0,00	
	b.	Terdapat upaya untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model	a. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja b. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change dan role model namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change dan role model	A/B/C/D	A	1,00	
2. DEREGULASI KEBUJAKAN		1,00			Ya	0,50	50,00
- Harmonisasi		1,00			Ya	0,50	50,00
	a.	Terlaksana identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus	a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat	A/B/C	A	1,00	

				b. Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat		a. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya kebijakan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat	A/B/C	C	0,00		
	3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI			2,00			Ya	1,12	56,00	
		I.	Evaluasi Kelembagaan			1,00		Ya	0,95	95,00	
			a.	Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi		a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan seluruh fungsi dan ukuran organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan sebagian fungsi dan ukuran organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi	A/B/C	A	1,00		
			b.	Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi		a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur sebagian jenjang organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	A/B/C	A	1,00		
			c.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi		a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis sebagian kemungkinan duplikasi fungsi c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	A/B/C	A	1,00		
			d.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan		a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan seluruh pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	A/B/C	A	1,00		
			e.	Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit kerja di atasnya		a. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja b. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian sebagian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja c. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja	A/B/C	A	1,00		
			f.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya		a. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya b. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sedang dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya c. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sempit dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya	A/B/C	A	1,00		
			g.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan		a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	A/B/C	A	1,00		
			h.	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat /kewenangan		a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan mandat b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan mandat c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	A/B/C	A	1,00		
			i.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain		a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih seluruh fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih sebagian fungsi c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi	A/B/C	A	1,00		
			j.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis		a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan seluruh struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan sebagian struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	A/B/C	B	0,50		
		II.	Tindak Lanjut Evaluasi			1,00			0,17	15,30	
			a.	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi		a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	C	0,33		
			b.	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi		a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	D	0,00		
	4	PENATAAN TATALAKSANA			1,00			Ya	0,95	95,00	
		I.	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)			0,50			0,45	90,00	
			a.	Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis		a. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah b. Sebagian peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah c. Peta proses bisnis belum disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	A/B/C	A	1,00		
			b.	Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi		a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan tugas dan fungsi	A/B/C	A	1,00		
			c.	Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi		a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi	A/B/C	A	1,00		

			d. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang		a. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja b. Sebagian besar jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja c. Sebagian kecil jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja d. Peta proses bisnis belum selaras dengan kinerja	A/B/C/D	A	1,00	
			e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)		a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP	A/B/C/D	B	0,67	
			f. Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP		a. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP b. Telah dilakukan penjabaran sebagian peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP c. Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP	A/B/C	B	0,50	
			g. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan		a. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan b. Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan c. Sebagian kecil Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan d. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) belum diterapkan	A/B/C/D	A	1,00	
			h. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi		a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan prosedur operasional	A/B/C/D	A	1,00	
			i. Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi		a. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi b. Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi c. Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi	A/B/C	A	1,00	
			ii. Keterbukaan Informasi Publik	0,50					
			a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik		Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik			0,50	100,00
			b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	A/B/C	A	1,00	
			5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1,40					
			i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	0,20			Ya	1,16	82,85
			a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja		a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan unit kerja c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan	A/B/C	A	1,00	
			b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan		a. Analisis seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan b. Analisis sebagian jabatan dan beban kerja telah dilakukan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A/B/C	A	1,00	
			c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama		a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A/B/C/D	A	1,00	
			ii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	0,20				0,03	15,00
			a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi		a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C/D	D	0,00	
			b. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi		a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi	A/B/C/D	C	0,33	
			iii. Penetapan Kinerja Individu	0,40				0,40	100,00
			a. Penerapan Penetapan kinerja individu		a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu	A/B/C/D	A	1,00	
			b. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi		a. Seluruh penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi d. Penilaian kinerja individu belum terkait dengan kinerja organisasi	A/B/C/D	A	1,00	
			c. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya		a. Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya b. Sebagian besar ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya c. Sebagian kecil ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya	A/B/C/D	A	1,00	

			d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik		a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan	A/B/C/D/E	A	1,00	
			e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.		a. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara bulanan b. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara triwulanan c. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara semesteran d. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tahunan e. Belum dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu	A/B/C/D/E	A	1,00	
			f. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya		a. Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya c. Sebagian kecil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya	A/B/C/D	A	1,00	
			iv. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	0,20				0,20	100,00
			a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan		a. Seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan b. Sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan c. Sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan	A/B/C/D	A	1,00	
			b. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku		a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	A/B/C	A	1,00	
			v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0,20				0,13	65,00
			a. Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)		a. Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja b. Unit kerja mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebijakan pusat c. Unit kerja hanya mengimplementasikan SKJ pada sebagian jabatan d. SKJ belum diimplementasi	A/B/C/D	A	1,00	
			b. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ		a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ namun belum memberikan dampak pengembangan SDM c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan berdasarkan SKJ d. Evaluasi jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ e. Evaluasi jabatan belum dilaksanakan	A/B/C/D/E	D	0,25	
			vi. Sistem Informasi Kepegawaian	0,20				0,20	100,00
			- Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai		Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian	Ya/Tidak	Ya	1,00	
6			PENGUATAN AKUNTABILITAS	2,50			Ya	1,95	78,00
			i. Keterlibatan pimpinan	1,00				0,89	89,00
			a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra		a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Renstra b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Renstra c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Renstra d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	A/B/C/D	C	0,33	
			b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja		a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Penetapan Kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Penetapan Kinerja c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Penetapan Kinerja d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	A/B/C/D	A	1,00	
			c. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala		a. Pimpinan unit kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja secara berkala c. Pimpinan unit kerja memantau sebagian kecil pencapaian kinerja secara berkala d. Pimpinan unit kerja belum memantau pencapaian kinerja secara berkala	A/B/C/D	A	1,00	
			d. Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah		a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan jangka menengah, namun tidak memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan jangka menengah d. Dokumen perencanaan jangka menengah tidak ada	A/B/C/D	A	1,00	
			e. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun		a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan kinerja tahunan, namun tidak memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan kinerja tahunan d. Dokumen perencanaan kinerja tahunan tidak ada	A/B/C/D	A	1,00	
			f. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala		a. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian rencana aksi secara berkala, namun tidak menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala c. Pimpinan unit kerja hanya menyusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berkala d. Pimpinan unit kerja tidak membuat rencana aksi pencapaian kinerja	A/B/C/D	A	1,00	
			ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1,50				1,07	71,33
			a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja		a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas seluruh SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian besar SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian kecil SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Belum ada upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A/B/C/D	B	0,67	

			b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala		a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan	A/B/C/D/E	B	0,75		
7			PENGUATAN PENGAWASAN	2,20				Ya	1,97	89,54
			I. Gratifikasi	0,30					0,26	86,66
			a. Telah dilakukan public campaign		a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign	A/B/C	B	0,50		
			b. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan		Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi	Ya/Tidak	Ya	1,00		
			c. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi		Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya/Tidak	Ya	1,00		
			d. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti		Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Ya/Tidak	Ya	1,00		
			II. Penerapan SPIP	0,30					0,20	66,66
			a. Telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian		a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian b. Unit kerja telah mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian c. Unit kerja belum mengidentifikasi lingkungan pengendalian	A/B/C	A	1,00		
			b. Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja		a. Unit kerja telah menilai seluruh risiko b. Unit kerja telah menilai sebagian besar risiko c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian risiko	A/B/C/D	D	0,00		
			c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		a. Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian c. Sebagian kecil risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian d. Risiko belum dikendalikan	A/B/C/D	D	0,00		
			d. Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait		a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI	A/B/C/D	A	1,00		
			e. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern		a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern	A/B/C	A	1,00		
			f. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI		a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI b. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala namun belum memberikan perbaikan dalam penerapan SPI c. Monitoring dan evaluasi dilakukan belum secara berkala d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI	A/B/C/D	A	1,00		
			III. Pengaduan Masyarakat	0,50					0,45	90,00
			a. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti d. Belum ada tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	A/B/C/D	B	0,67		
			b. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	A	1,00		
			c. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	Ya/Tidak	Ya	1,00		
			IV. Whistle Blowing System	0,30					0,30	100,00
			- Whistle Blowing System telah disosialisasikan		a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh pegawai b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar pegawai c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai d. Whistle blowing system belum disosialisasikan	A/B/C/D	A	1,00		
			V. Penanganan Benturan Kepentingan	0,30					0,26	86,66
			a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan		a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke seluruh pegawai b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke sebagian besar pegawai c. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan	A/B/C/D	A	1,00		
			b. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan		Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya/Tidak	Ya	1,00		
			c. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan		a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	B	0,50		
			d. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti		a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti d. Belum ada tindak lanjut atas Penanganan Benturan Kepentingan	A/B/C/D	A	1,00		
			VI. Pembangunan Zona Integritas	0,50					0,50	100,00
			a. Telah dilakukan perencanaan Pembangunan zona integritas level unit kerja		Ya, apabila terdapat Dokumen penandatanganan pakta integritas	Ya/Tidak	Ya	1,00		
			b. Telah dilakukan pembangunan zona integritas		a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas	A/B/C	A	1,00		
			c. Telah dilakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas		a. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi secara berkala b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak secara berkala c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi	A/B/C	A	1,00		
8			PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2,50				Ya	1,83	75,20
			I. Standar Pelayanan	0,40					0,27	67,50
			a. Terdapat kebijakan standar pelayanan		a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku e. Standar Pelayanan belum ditetapkan	A/B/C/D/E	A	1,00		

			b.	Standar pelayanan telah dimaklumkan	a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan	A/B/C/D	C	0,33	
			c.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	A/B/C/D	B	0,67	
								0,27	67,50
			II.	Budaya Pelayanan Prima	0,40				
			a.	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan d. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	A/B/C/D	C	0,33	
			b.	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website /media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website /media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di tempat layanan (intranet dan non elektronik) d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses	A/B/C/D	B	0,67	
			c.	Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi	A/B/C/D	A	1,00	
			d.	Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar	A/B/C/D	D	0,00	
			e.	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras b. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras c. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu, namun sarana prasarana layanan belum memenuhi standar sarpras d. Apabila pelayanan belum terpadu	A/B/C/D	A	1,00	
			f.	Telah terdapat inovasi pelayanan	a. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain b. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi belum direplikasi oleh instansi lain c. Inovasi pelayanan belum mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi telah direplikasi oleh instansi lain d. Belum terdapat inovasi pelayanan	A/B/C/D	A	1,00	
								0,55	91,56
			III.	Pengelolaan Pengaduan	0,60				
			a.	Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan	a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPORI b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPORI c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan	A/B/C/D/E	A	1,00	
			b.	Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAPORI di level Organisasi b. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPORI di level unit kerja c. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPORI di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPORI di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada d. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPORI di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPORI di level unit kerja	A/B/C/D	A	1,00	
			c.	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan d. Belum dilakukan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan	A/B/C/D	B	0,67	
			d.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	A/B/C	A	1,00	
			IV.	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	0,70			0,41	58,57

			a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A/B/C/D/E	D	0,25		
			b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website , media sosial, dll) dan offline b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi	A/B/C	B	0,50		
			c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	A/B/C/D	A	1,00		
			v. Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,40				0,33	82,50
			a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan	A/B/C/D	B	0,67		
			b. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A/B/C	A	1,00		
III.	REFORM			21,70					
	1	MANAJEMEN PERUBAHAN		3,00				18,17	86,59
		I. Komitmen dalam Perubahan		1,50				2,59	86,33
		a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi		1 Agen 1 Perubahan				1,50	100,00
		- Jumlah Agen Perubahan			%	100,00%	1,00		
		- Jumlah Perubahan yang dibuat			Jumlah	3,00			
		b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen		Perubahan/Inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan	%	100,00%	1,00		
		- Jumlah Perubahan yang dibuat			Jumlah	21,00			
		- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen			Jumlah	21,00			
		c. Instansi mendorong unit kerja untuk melakukan perubahan (reform)		Bentuk perubahan (reform) yang dilakukan unit kerja, misalnya: pembangunan zona integritas, pembuatan inovasi, dsb	%	100,00%	1,00		
		- Jumlah unit kerja seluruhnya			Jumlah	5,00			
		- Jumlah unit kerja yang melakukan perubahan			Jumlah	5,00			
		II. Komitmen Pimpinan		1,00				0,75	75,00
		- Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan		a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai c. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai d. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja, namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan) e. Tidak ada target capaian reformasi di dokumen perencanaan unit kerja	A/B/C/D/E	B	0,75		
	III.	Membangun Budaya Kerja		0,50				0,34	68,00
		- Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari		a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi	A/B/C/D	B	0,67		
	2	DEREGULASI KEBUJAKAN		2,00				2,00	100,00
		- Peran Kebijakan		2,00				2,00	100,00
		a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya		a. Semua kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya b. Sebagian kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya c. Belum memiliki peta keterkaitan kebijakan yang baru terbit dengan kebijakan lainnya	A/B/C	A	1,00		
		b. Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja		Persentase diperoleh dari Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama Instansi dibagi dengan Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit	%	100,00%	1,00		
		- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit			Jumlah	21,00			
		- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi			Jumlah	21,00			
	3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		1,50				0,75	50,00
		- Organisasi Berbasis Kinerja		1,50				0,75	50,00
		- Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan.		a. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan b. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan c. Belum ada usulan	A/B/C	B	0,50		
	4	PENATAAN TATALAKSANA		3,75				2,59	69,06
		i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyerahan Jabatan		0,50				0,34	68,00
		- Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyerahan jabatan		a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyerahan seluruh jabatan b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyerahan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyerahan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyerahan jabatan	A/B/C/D	B	0,67		

II. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi		1,25				1,25	100,00
a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien		a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	A	1,00		
b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien		a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	A	1,00		
III. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat		2,00				1,00	50,00
a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.	A/B/C/D/E	C	0,50		
b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.	A/B/C/D/E	C	0,50		
c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.	A/B/C/D/E	C	0,50		
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		2,00				1,25	62,50
I. Kinerja Individu		1,00				1,00	100,00
- Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya		a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome)	A/B/C	A	1,00		
II. Assessment Pegawai		0,50				0,25	50,00
- Hasil assessment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai		a. Seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai b. Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai c. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C	B	0,50		
III. Pelanggaran Disiplin Pegawai		0,50				0,00	0,00
- Penurunan pelanggaran disiplin pegawai		Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	%	0,00%	0,00		
- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya			Jumlah	0,00			
- Jumlah pelanggaran tahun ini			Jumlah	0,00			
- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman			Jumlah	0,00			
						3,72	99,20
6. PENGUATAN AKUNTABILITAS		3,75				0,97	97,00
I. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran		1,00					
- Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien							
- Jumlah Program/Kegiatan yang ada sebelumnya			Jumlah	9,00			
- Jumlah program			Jumlah	22,00			
- Jumlah kegiatan							
- Jumlah Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:		Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau lebih					
- Jumlah program			Jumlah	9,00			
- Jumlah kegiatan			Jumlah	22,00			
- Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih		Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja	%	100,00%	1,00		
- Jumlah Sasaran Kinerja			Jumlah	100,00			
- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih			Jumlah	100,00			
- Persentase Anggaran yang berhasil difocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:		Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran Kinerja tercapai 100% atau lebih Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil difocussing dibagi dengan Jumlah Anggaran Total	%	93,07%	0,93		

		- Jumlah Anggaran Total			Rupiah	2.976.889.487		
		- Jumlah Anggaran yang berhasil difokuskan			Rupiah	2.770.618.140		
			1,00				1,00	100,00
	ii.	Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas						
		- Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran		a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektifitas dan efisiensi penganggaran b. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja namun belum menunjukkan efektifitas dan efisiensi penganggaran c. Aplikasi belum terintegrasi namun sudah dimanfaatkan untuk monitoring kinerja d. Aplikasi belum digunakan untuk pemanfaatan monitoring kinerja	A/B/C/D	A	1,00	
	iii.	Pemberian Reward and Punishment	1,00				1,00	100,00
		- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment oleh unit kerja		a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment; b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment; c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment; d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian reward and punishment.	A/B/C/D	A	1,00	
	iv.	Kerangka Logis Kinerja	0,75				0,75	100,00
		- Terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai		a. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; b. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; c. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun belum mengacu pada kinerja utama organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; d. Peta strategis (Kerangka Logis) belum ada.	A/B/C/D	A	1,00	
	7	PENGUATAN PENGAWASAN	1,95				1,95	100,00
	i.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	0,75				0,75	100,00
		- Persentase penyampaian LHKPN		Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:	%	100,00%	1,00	
		- Jumlah yang harus melaporkan			Jumlah	1,00		
		- Eselon I/II			Jumlah	0,00		
		- Lainnya			Jumlah	1,00		
		- Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	1,00		
	ii.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	0,60				0,60	100,00
		- Persentase penyampaian LHKASN		Penyampaian LHKASN diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015	%	100,00%	1,00	
		- Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)			Jumlah	19,00		
		- Jumlah Eselon III			Jumlah	2,00		
		- Jumlah Eselon IV			Jumlah	8,00		
		- Jumlah Fungsional dan Pelaksana			Jumlah	9,00		
		- Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	19,00		
	iii.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,60				0,60	100,00
		- Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat		Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan	%	100,00%	1,00	
		- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti			Jumlah	5,00		
		- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses			Jumlah	0,00		
		- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti			Jumlah	5,00		
	8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3,75				3,34	89,06
	i.	Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2,50				2,50	100,00
		a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Perilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah) b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak pada perbaikan pelayanan publik yang prima (Cepat dan mudah) c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan d. Belum ada inovasi	A/B/C/D	A	1,00	
		b. Upaya dan/atau inovasi pada perjanjian/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Alur lebih pendek/singkat 3. Terintegrasi dengan aplikasi		Persentase diperoleh dari Jumlah perjanjian/pelayanan yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perjanjian/pelayanan yang terdata/terdaftar	%	100,00%	1,00	
		- Jumlah perjanjian/pelayanan yang terdata/terdaftar			Jumlah	18,00		
		- Jumlah perjanjian/pelayanan yang telah dipermudah			Jumlah	18,00		
							0,84	67,20
	ii.	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan	1,25					
		- Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab		a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media terbatas	A/B/C/D	B	0,67	



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825 – 30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK

Gresik, 27 Agustus 2021

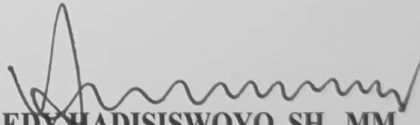
Nomor : X.700/1297/437.72/2021
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Monitoring dan Evaluasi
Reformasi Birokrasi OPD

Kepada
Yth. Kepala Kecamatan Sangkapura
Kabupaten Gresik
di-
G R E S I K

Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, maka diminta Saudara agar **memanfaatkan dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut untuk dapatnya meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi lebih baik dan terarah.**

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK


EDY HADISISWOYO, SH., MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680503 199703 1 011

